



Komersialisme dan Kepentingan Publik dalam *Blocking Time* Siaran Konvensi Partai Demokrat di TVRI

<https://doi.org/10.25008/caraka.v6i1.190>

Muhamad Taufiq
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis keseimbangan antara komersialisme dan kepentingan publik dalam slot waktu siaran TVRI, dengan fokus pada kasus siaran Konvensi Partai Demokrat tahun 2013. TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan yang independen dan netral, sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran. Namun, penyiaran konvensi partai politik ini menimbulkan kontroversi dan mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena dianggap melanggar prinsip-prinsip jurnalistik dan penyiaran publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis konten dan wawancara mendalam untuk mengevaluasi bagaimana TVRI menyeimbangkan antara tuntutan komersial dan kewajiban melayani kepentingan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TVRI menghadapi tantangan dalam menjaga netralitas dan independensi penyiaran, sementara tetap memenuhi kebutuhan operasional dan komersial. Implikasi penelitian ini menggarisbawahi pentingnya regulasi dan pengawasan yang ketat dalam industri penyiaran untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran publik dapat menjalankan perannya secara efektif dan adil.

Kata Kunci: TVRI, KPI, Slot Time, Komersialisasi, Lembaga Publik

ABSTRACT

This study analyzes the balance between commercialism and public interest in TVRI's broadcast slots, focusing on the case of the Democratic Party Convention broadcast in 2013. As a public broadcasting institution, TVRI is responsible for providing independent and neutral services per the Broadcasting Law. However, the broadcast of this political convention sparked controversy and received a reprimand from the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) for allegedly violating journalistic principles and public broadcasting standards. This study employs qualitative methods, including content analysis and in-depth interviews, to evaluate how TVRI balances commercial demands with its obligation to serve the public interest. The findings indicate that TVRI faces challenges in maintaining neutrality and independence in broadcasting while meeting operational and commercial needs. The implications of this study underscore the importance of strict regulation and oversight in the broadcasting industry to ensure that public broadcasting institutions can effectively and fairly fulfill their roles.

Keyword: TVRI, KPI, Slot Time, Commercialization, Public Institution

Author's email correspondent: mumahad.taufiq@umj.ac.id

The author declares that they have no conflict of interest in the research and publication of this manuscript.
Copyright © 2025 (Muhamad Taufiq)
Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0). Available at http://caraka.web.id
Submitted: 21/01/2025; Revised: 15/04/2025; Accepted: 19/05/2025

PENDAHULUAN

Televisi Republik Indonesia (TVRI) adalah jaringan televisi publik berskala nasional di Indonesia. TVRI berstatus sebagai Lembaga Penyiaran Publik bersama Radio Republik Indonesia (RRI), yang ditetapkan melalui Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran. TVRI merupakan jaringan televisi pertama di Indonesia, mulai mengudara pada tanggal 24 Agustus 1962 dan diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. TVRI saat ini mengudara di seluruh wilayah Indonesia dengan menjalankan 3 saluran televisi nasional dan 35 stasiun televisi daerah, serta didukung 361 stasiun transmisi (termasuk 129 stasiun transmisi digital) di seluruh Indonesia. Selain di televisi konvensional, siaran TVRI juga dapat ditonton melalui siaran streaming di situs resmi, aplikasi TVRI Klik, dan layanan OTT lainnya.

Berdirinya TVRI memiliki misi penting, yaitu menyediakan informasi, pendidikan, dan hiburan kepada seluruh rakyat Indonesia. Stasiun ini memainkan peran krusial dalam sejarah penyiaran di Indonesia, terutama sebagai media penyiaran yang menghubungkan berbagai daerah di nusantara. Sejak awal berdirinya, TVRI telah berkomitmen untuk memberikan tayangan yang berkualitas dan mendidik. Program-program yang ditayangkan oleh TVRI mencakup berbagai jenis konten, mulai dari berita, dokumenter, acara anak-anak, hingga hiburan. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga independensi dan integritasnya dalam menyajikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. (Ummah et al., 2021)

Dalam UU No.32 Tahun 2002, Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan-peraturan perundangundangan yang berlaku.

Selain itu, TVRI juga berperan dalam mendukung program-program pemerintah, seperti kampanye kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Melalui jaringan yang luas, TVRI mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh media lainnya. Peran TVRI dalam sejarah Indonesia juga terlihat dari partisipasinya dalam berbagai peristiwa penting, seperti siaran langsung upacara kemerdekaan Indonesia dan kegiatan kenegaraan lainnya. Hal ini menjadikan TVRI sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia.

TVRI telah menjalankan perannya sebagai media penyiaran yang menghubungkan berbagai daerah di nusantara dan menyajikan informasi, pendidikan, serta hiburan kepada masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan untuk tetap relevan dan berkelanjutan, TVRI menghadapi tantangan dalam

menyeimbangkan antara kepentingan komersial dan tanggung jawabnya sebagai lembaga penyiaran publik.

Salah satu bentuk komersialisasi yang diterapkan oleh TVRI adalah melalui konsep *slot time*, yaitu menjual waktu tayang kepada pihak ketiga untuk menayangkan program atau iklan. Praktik ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga menjadi sarana bagi TVRI untuk memperkaya ragam konten yang disajikan kepada penonton. Meskipun demikian, penerapan *slot time* ini menimbulkan dilema tersendiri, terutama dalam menjaga keseimbangan antara konten komersial dan pelayanan kepentingan publik.

Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 menjadi landasan hukum yang mengatur operasional TVRI, termasuk kewajiban dan batasan yang harus dipatuhi dalam menyajikan konten. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, sumber pendanaan TVRI dapat berasal dari iuran penyiaran, APBN, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Usaha lain tersebut, yang saat ini digabungkan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020, meliputi jasa digitalisasi penyiaran (iklan di situs web), jasa pendidikan dan pelatihan pertelevisian, jasa sertifikasi profesi penyiaran televisi, jasa penggunaan sarana dan prasarana (sewa tempat di pemancar dan lahan aset), jasa produksi acara, jasa multipleksing, dan royalti produksi acara.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai konsep *slot time* di TVRI, dampak komersialisme terhadap kualitas tayangan, dan bagaimana TVRI dapat tetap memenuhi tanggung jawabnya sebagai penyedia layanan publik di bawah regulasi penyiaran yang berlaku.

Slot Time dan Komersialisme

Freda Morris dalam bukunya *Broadcast Journalism Techniques* mengemukakan bahwa berita adalah sesuatu yang baru, penting yang dapat memberikan dampak dalam kehidupan manusia. Terdiri dari unsur baru, penting, dan bermanfaat bagi manusia. Berita tidak sama dengan peristiwa. Peristiwa ialah suatu kejadian, sedangkan berita adalah cerita tentang peristiwa itu. Kenyataannya, tidak mudah menceritakan suatu peristiwa secara sempurna.

Slot time adalah waktu tayang yang dijual oleh stasiun televisi kepada pihak ketiga, seperti perusahaan atau produser program, untuk menayangkan konten mereka. Pihak ketiga membayar sejumlah uang kepada stasiun televisi untuk mendapatkan slot waktu tertentu dalam jadwal tayang. Slot time biasanya digunakan sebagai sumber pendapatan tambahan bagi stasiun televisi, termasuk TVRI. Dengan menjual slot waktu tayang, stasiun televisi dapat memperoleh dana yang diperlukan untuk operasi dan pengembangan kontennya.

Sebagai stasiun televisi publik, TVRI juga menggunakan slot time untuk menayangkan program atau iklan dari pihak ketiga. Namun, TVRI harus memastikan bahwa konten yang ditayangkan melalui slot time tetap sesuai dengan visi dan misi lembaga penyiaran publik. Komersialisme melalui slot time dapat mempengaruhi jenis konten yang disiarkan oleh TVRI. Program-program yang dihasilkan oleh pihak ketiga mungkin lebih berorientasi pada hiburan dan iklan, daripada informasi dan pendidikan.

Ini dapat menyebabkan pergeseran fokus dari pelayanan publik ke pendapatan komersial.

TVRI harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menghasilkan pendapatan melalui slot time dan tanggung jawabnya sebagai lembaga penyiaran publik. TVRI harus berhati-hati agar tidak terlalu bergantung pada pendapatan dari slot time sehingga mengabaikan kepentingan publik. Tergantung pada kualitas program yang dibawa oleh pihak ketiga, slot time bisa berpengaruh positif atau negatif terhadap kualitas tayangan TVRI. Program dengan kualitas tinggi dapat meningkatkan daya tarik dan kepuasan penonton, sementara program dengan kualitas rendah dapat merusak reputasi TVRI.

TVRI harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menghasilkan pendapatan melalui slot time dan tanggung jawabnya sebagai lembaga penyiaran publik. TVRI harus berhati-hati agar tidak terlalu bergantung pada pendapatan dari slot time sehingga mengabaikan kepentingan publik. Untuk mengurangi dampak negatif komersialisme, TVRI harus memiliki mekanisme kontrol yang ketat terhadap konten yang ditayangkan melalui slot time. Regulasi internal dan pengawasan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sangat penting untuk memastikan bahwa slot time tidak merusak integritas dan visi TVRI sebagai stasiun televisi publik.

Siaran Konvensi Partai Demokrat di TVRI

Siaran Konvensi Partai Demokrat di TVRI pada tahun 2013 menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah penyiaran publik di Indonesia. Pada tanggal 15 September 2013, TVRI menayangkan siaran langsung Konvensi Partai Demokrat selama lebih dari dua setengah jam. Siaran ini menimbulkan kontroversi dan mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena dianggap melanggar prinsip-prinsip penyiaran publik yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3&SPS) KPI

KPI menilai bahwa siaran tersebut tidak mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik, seperti keberimbangan dan ketidakberpihakan. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI seharusnya bersifat independen dan netral, serta memberikan layanan yang berpihak pada kepentingan publik. Namun, dalam kasus ini, TVRI dianggap tidak memenuhi standar tersebut, sehingga KPI menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Teguran ini menunjukkan pentingnya menjaga integritas dan netralitas dalam penyiaran publik, terutama dalam konteks politik (Swastiwi, 2024).

TVRI menjelaskan bahwa siaran konvensi tersebut merupakan hasil dari rapat dengar pendapat di DPR pada tanggal 10 September 2013. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa TVRI akan menayangkan siaran langsung konvensi partai politik sebagai bagian dari upaya memberikan informasi kepada publik. Meskipun demikian, KPI tetap menegaskan pentingnya TVRI untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua partai politik peserta Pemilu dan menjaga prinsip-prinsip penyiaran publik yang netral dan independen.

Kontroversi ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh lembaga penyiaran publik dalam menyeimbangkan antara kepentingan komersial dan kepentingan publik. Di satu sisi, TVRI perlu menjaga keberlanjutan operasionalnya dengan menarik penonton dan iklan. Di sisi lain, TVRI memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang objektif dan tidak memihak kepada publik. Siaran Konvensi Partai

Demokrat di TVRI menjadi contoh bagaimana lembaga penyiaran publik harus berhati-hati dalam menavigasi batas-batas antara kepentingan komersial dan kepentingan publik.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini dibangun di atas fondasi teori ekonomi politik media dan teori pelayanan publik dalam penyiaran. Teori ekonomi politik media, sebagaimana dikemukakan oleh Vincent Mosco (2009), memandang media sebagai institusi yang tidak terlepas dari struktur ekonomi dan kekuasaan politik. Dalam konteks ini, media publik seperti TVRI berada dalam ruang tarik-menarik antara tuntutan untuk mandiri secara finansial dan kewajiban untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Salah satu bentuk ketegangan ini termanifestasi dalam praktik *blocking time*, yaitu penjualan waktu siar kepada pihak ketiga—dalam hal ini Partai Demokrat untuk keperluan penyiaran Konvensi Calon Presiden. Praktik ini mencerminkan logika komersial yang dapat mengaburkan batas antara informasi publik dan kepentingan politik yang dibungkus dalam format siaran media.

Lebih lanjut, teori pelayanan publik dalam media, sebagaimana digariskan oleh Denis McQuail(2010), menekankan pentingnya prinsip akses universal, keberimbangan, independensi editorial, serta akuntabilitas media kepada masyarakat, bukan kepada pemilik modal atau kekuatan politik tertentu. TVRI sebagai lembaga penyiaran publik seharusnya menjunjung tinggi etika penyiaran, netralitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas. Namun, dalam praktiknya, muncul pertanyaan kritis: sejauh mana TVRI mampu mempertahankan independensinya ketika tunduk pada tekanan ekonomi dan politik? Oleh karena itu, kajian ini juga meminjam konsep "komodifikasi informasi" dari Dallas Smythe, yang menjelaskan bagaimana isi media dapat diperlakukan sebagai barang dagangan, di mana audiens dijadikan produk yang dijual kepada pengiklan atau sponsor. Kerangka ini digunakan untuk membaca siaran Konvensi Partai Demokrat sebagai konten yang tidak lagi murni informatif, melainkan sarat kepentingan ekonomi dan politis yang dapat mereduksi peran media publik sebagai pengawal demokrasi(Mulayana, 2014).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang dianggap paling relevan untuk mengkaji secara mendalam fenomena spesifik terkait praktik *blocking time* Konvensi Partai Demokrat di TVRI. Studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi kontekstual terhadap isu yang kompleks dan berkaitan dengan struktur kekuasaan, regulasi, serta etika jurnalistik dalam lembaga penyiaran publik. Lokasi penelitian difokuskan pada siaran TVRI selama periode penyelenggaraan konvensi, dengan unit analisis mencakup konten siaran, kebijakan redaksional, serta respon publik terhadap tayangan tersebut(Sugiyono, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode: pertama, analisis dokumen yang mencakup regulasi penyiaran (seperti UU Penyiaran, Peraturan KPI, dan Pedoman Perilaku Penyiaran), arsip siaran konvensi, serta laporan internal TVRI bila tersedia. Kedua, wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci,

antara lain mantan atau petinggi TVRI, anggota KPI, pengamat media, akademisi komunikasi politik, serta jurnalis yang terlibat langsung atau memiliki pengamatan terhadap kasus ini. Ketiga, dilakukan analisis wacana terhadap isi siaran untuk melihat konstruksi pesan dan narasi yang dibentuk dalam tayangan konvensi tersebut (Fitryarini, 2023).

Data dianalisis secara tematik dengan teknik coding terbuka untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul dari data, seperti bentuk intervensi politik, komersialisasi konten, serta dampaknya terhadap integritas lembaga penyiaran publik. Validitas dan reliabilitas dijaga melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, serta member checking kepada informan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian media dan komunikasi politik, serta masukan praktis bagi perbaikan tata kelola penyiaran publik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kasus ini, siaran Konvensi Partai Demokrat dianggap memberikan keuntungan yang tidak adil kepada satu partai politik, yang bertentangan dengan prinsip keberimbangan yang harus dijaga oleh TVRI. Selain itu, ketidakberpihakan dalam penyiaran adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran publik. TVRI, sebagai lembaga yang didanai oleh masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua konten yang disiarkan mencerminkan kepentingan publik secara keseluruhan dan tidak memihak pada kelompok atau individu tertentu (Priandi & Roisah, 2019).

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat merusak reputasi TVRI dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, KPI memberikan teguran sebagai langkah untuk mengingatkan TVRI akan pentingnya menjaga standar jurnalistik yang tinggi dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Isu mengenai TVRI yang menjual slot waktu siaran kepada Partai Demokrat juga menjadi perhatian publik. Siaran langsung Konvensi Partai Demokrat selama lebih dari dua setengah jam, yang kemudian mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI menilai bahwa siaran tersebut tidak mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik seperti keberimbangan dan ketidakberpihakan, yang seharusnya dijunjung tinggi oleh lembaga penyiaran publik seperti TVRI.

Pelanggaran Prinsip Jurnalistik

KPI menilai bahwa siaran Siaran Konvensi Partai Demokrat di TVRI tidak mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik, seperti keberimbangan dan ketidakberpihakan. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI seharusnya bersifat independen dan netral, serta memberikan layanan yang berpihak pada kepentingan publik (KPI, 2020). KPI menegaskan bahwa penyiaran publik harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik tertentu.

Penjelasan TVRI

TVRI menjelaskan bahwa siaran konvensi tersebut merupakan hasil dari rapat dengar pendapat di DPR pada tanggal 10 September 2013. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa TVRI akan menayangkan siaran langsung konvensi partai politik

sebagai bagian dari upaya memberikan informasi kepada publik. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat mengenai proses politik yang sedang berlangsung. TVRI berpendapat bahwa dengan menayangkan konvensi partai politik secara langsung, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan tidak terdistorsi mengenai kandidat dan agenda politik yang diusung oleh partai tersebut.

Namun, keputusan ini tidak lepas dari kontroversi. Banyak pihak yang mengkritik langkah TVRI karena dianggap memberikan keuntungan yang tidak adil kepada satu partai politik, yang bertentangan dengan prinsip keberimbangan dan ketidakberpihakan yang harus dijaga oleh lembaga penyiaran publik. Kritikus berpendapat bahwa TVRI, sebagai lembaga yang didanai oleh masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua partai politik mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pesan mereka kepada publik.

Selain itu, keputusan untuk menayangkan siaran langsung konvensi partai politik ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana TVRI dapat menjaga independensi dan netralitasnya dalam menghadapi tekanan politik. Dalam konteks ini, penting bagi TVRI untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalistik yang tinggi dan mematuhi regulasi yang berlaku untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.

Dengan demikian, meskipun TVRI berusaha untuk memberikan layanan yang informatif kepada publik, keputusan untuk menayangkan siaran langsung konvensi partai politik ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga penyiaran publik dalam menyeimbangkan antara kepentingan komersial dan kepentingan publik.

Implikasi Terhadap Praktik Penyiaran

Kontroversi ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh lembaga penyiaran publik dalam menyeimbangkan antara kepentingan komersial dan kepentingan publik. Siaran Konvensi Partai Demokrat di TVRI menjadi contoh nyata bagaimana lembaga penyiaran publik harus berhati-hati dalam menavigasi batas-batas antara kepentingan komersial dan kepentingan publik. Dalam kasus ini, TVRI menghadapi dilema antara memenuhi kebutuhan operasional dan komersial dengan tetap menjaga integritas dan netralitas sebagai lembaga penyiaran publik.

Di satu sisi, TVRI perlu menarik penonton dan iklan untuk menjaga keberlanjutan operasionalnya. Namun, di sisi lain, TVRI memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang objektif dan tidak memihak kepada publik. Keputusan untuk menayangkan siaran langsung Konvensi Partai Demokrat menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana TVRI dapat menjaga independensi dan netralitasnya dalam menghadapi tekanan politik dan tuntutan komersial.

KPI menilai bahwa siaran tersebut tidak mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik seperti keberimbangan dan ketidakberpihakan, yang seharusnya dijunjung tinggi oleh lembaga penyiaran publik. Teguran yang diberikan oleh KPI menunjukkan pentingnya regulasi dan pengawasan yang ketat dalam industri penyiaran untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran publik dapat menjalankan perannya secara efektif dan adil.

Kontroversi ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyiaran publik. TVRI harus memastikan bahwa semua partai politik

mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pesan mereka kepada publik, dan tidak memberikan keuntungan yang tidak adil kepada satu pihak. Dengan demikian, lembaga penyiaran publik dapat terus memberikan layanan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat luas, sambil tetap menjaga kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengeksplorasi keseimbangan antara komersialisme dan kepentingan publik dalam slot waktu siaran TVRI, dengan studi kasus siaran Konvensi Partai Demokrat pada tahun 2013. TVRI, sebagai lembaga penyiaran publik, memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang objektif, netral, dan berpihak pada kepentingan publik. Namun, dalam konteks siaran Konvensi Partai Demokrat, TVRI mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena dianggap melanggar prinsip-prinsip jurnalistik seperti keberimbangan dan ketidakberpihakan.

Kontroversi ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh TVRI dalam menavigasi batas antara kepentingan komersial dan tanggung jawab publik. Isu mengenai penjualan slot waktu siaran kepada Partai Demokrat semakin memperkeruh situasi, menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan integritas lembaga penyiaran publik. Sebagai lembaga yang didanai oleh masyarakat, TVRI harus memastikan bahwa semua konten yang disiarkan mencerminkan kepentingan publik dan tidak memihak pada kelompok atau individu tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip jurnalistik dapat merusak reputasi TVRI dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, teguran dari KPI menjadi langkah penting untuk mengingatkan TVRI akan pentingnya menjaga standar jurnalistik yang tinggi dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya regulasi dan pengawasan yang ketat dalam industri penyiaran untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran publik seperti TVRI dapat menjalankan perannya secara efektif dan adil. TVRI perlu menyeimbangkan kebutuhan untuk menghasilkan pendapatan melalui slot waktu siaran dengan tanggung jawabnya sebagai penyedia layanan publik, untuk terus memberikan tayangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitryarini, I. (2023). Pembentukan Budaya Populer Dalam Kemasan Media Komunikasi Massa. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 2(2), 9–22.
- Indainanto, Y. I., & Nasution, F. A. (2020). Representasi di media sosial sebagai pembentuk identitas budaya populer. *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 14(1).
- Mulayana, D. (2014). *Ilmu Komunikasi: Suatu pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2001). *Human development* (8th ed.). Boston: McGraw-Hill.
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106–116.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swastiwi, A. W. (2024). *Globalisasi dan Media: Konvergensi Budaya dan Komunikasi*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Ummah, A. H., Djuanda, G., Ahmad, D., Afriza, E. S. D., Athalarik, F. M., Moekahar, F., ... Dewi, N. P. S. (2021). *Komunikasi Korporat Teori Dan Praktis*.